



Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Subari¹, Sri Wahyu Hidayati²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: subarisejarah@gmail.com, wahyuyayuk21@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-27 Revised: 2023-05-22 Published: 2023-06-04 Keywords: <i>Legitimacy of Power; Democratization Swirl; New Order Period.</i>	This research is historical research that places more emphasis on literature review by collecting books and articles as the primary data source in this writing. This study uses the historical method with a descriptive qualitative approach starting from heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The purpose of this research is to know historical events systematically and constructively that occurred during the New Order government. The results of the study show that the political constellation during the New Order government in 1966-1998 was the domination of power that colored civil political life. The political system and power monopoly practices played by the New Order government became a scourge due to pressure and intimidation by ABRI-Golkar against its political opponents. This condition was exacerbated by the government's intervention and meddling in the party's internal affairs which were in turmoil among party officials.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-27 Direvisi: 2023-05-22 Dipublikasi: 2023-06-04 Kata kunci: <i>Legitimasi Kekuasaan; Pusaran Demokratisasi; Masa Orde Baru.</i>	Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang lebih menekankan pada kajian literatur dengan mengumpulkan buku-buku dan artikel sebagai sumber data primer dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peristiwa sejarah secara sistematis dan konstruktif yang terjadi pada masa pemerintah Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstelasi politik pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966-1998 adalah dominasi kekuasaan yang mewarnai kehidupan politik sipil. Sistem politik dan praktek monopoli kekuasaan yang dimainkan pemerintah Orde Baru menjadi momok akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh ABRI-Golkar terhadap lawan politiknya. Kondisi ini kemudian diperparah akibat intervensi dan ikut campur pemerintah dalam urusan internal partai yang sedang begejolak sesama pengurus partai.

I. PENDAHULUAN

Pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia kedudukan militer tidak hanya sebatas memperjuangkan mengangkat senjata untuk melawan pemerintah Belanda tetapi juga mempunyai perjuangan politik yang jelas bersama pemuda untuk mengusir Belanda dari daerah jajahannya. Militer dan sipil sama-sama memperjuangkan hak yang didorong oleh motifasi berkarir untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh bapak proklamator Ir. Soekarno. Peran ganda militer sebagai kekuatan sipil militer didorong oleh rasa patriotik dan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. (Crouch, 1999). Dilain hal menurut (Yulianto, 2002) bahwa pembentukan militer tidak dilakukan dengan cara rekrutmen yang reguler seperti lazimnya tentara sekarang ini, tetapi dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat sipil untuk masuk militer. Lanjut Yulianto, gelombang masuknya militer dimulai pada tahun

1942 adalah militer didikan Belanda, yang kedua tahun 1942-1945 adalah militer hasil didikan Jepang, dan yang ketiga adalah tahun 1945-1949 adalah tentara bentukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa demokrasi liberal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tidak hanya sebagai kekuatan sipil yang hanya membantu korban perang, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai kekuatan militer dalam mempertahankan kehidupan bangsa. Keberadaan tentara untuk mengambil bagian dalam sosial politik disebabkan karena kelemahan-kelemahan sistem politik yang dibangun oleh para politisi dalam memperjuangkan perjuangan diplomasi. Disamping itu, militer bukan hanya sebagai perwakilan korps yang ada di lembaga sipil untuk memegang mandat dan mengambil langkah-langkah politik atas nama militer. Dan militer juga mempunyai hak sebagai kekuatan bersenjata untuk berperan

aktif dalam menentukan arah strategis dan kebijakan nasional.

Keterlibatan militer dalam kebijakan dan sistem politik nasional menimbulkan kekacauan perpolitikan Indonesia akibat pertentangan antara partai politik dalam parlemen. Sehingga kemudia pihak militer menyatukan komitmen untuk menyepakati untuk tidak lagi konfrontasi sesama korps tetapi mereka lebih mempersatukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Disisi lain untuk menjaga disharmonisasi di tubuh TNI akibat percaturan politik yang masif dan gerakan separatif di berbagai daerah, maka melalui KSAD A. H. Nasution meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan kebijakan "Keadaan Darurat Perang" dan berlakunya UU bahwa negara dalam keadaan bahaya. Hal lain, konsep yang dibangun oleh A.H. Nasution ketika TNI terlibat dalam percaturan politik praktis melalui Dewan Nasional adalah konsep "Jalan Tengah" yang dibacakan pada saat hari ulang tahun Akademi Militer ranggal 12 November 1958.

Dalam konsep jalan Tengah Tengah menurut A.H. Nasution adalah TNI tidak bisa mengikuti kegiatan politik militer di Amerika Latin yang memainkan peran politik secara langsung. Dan mereka tidak bisa mengikuti seperti militer di eropa barat yang berperan secara aktif dalam bidang politik, (Suryohadioprojo, 1996). Jalan tengah merupak konsep yang paling baik untuk ditempuh oleh TNI, sehingga mereka tidak akan melibatkan dirinya kedalam persoalan politik dan tidak akan menjadi penonton dalam arena politik Indonesia. Dalam konsep ini, Pihak TNI di berikesempatan untuk dapat ikut bagian dalam pemerintahan dan memanfaatkan dibidang keahlian baik di dalam kemiliteran maupun sosial politik. Dinamika politik yang demikian bergejolak yang dimainkan oleh politik parlemen, sehingga tidak mampu membuat undang-undang baru yang kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli dan membubarkan konstituante.

Melalui Dekrit Presiden situasi politik Indonesia dibawah Demokrasi Terpimpin dimana Presiden Soekarno lebih berkuasa dalam sistem kekuasaan yang ada dan dibantu oleh kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedangkan dilain pihak TNI yang merupakan lawan PKI sedang memainkan peran politik yang dibangun melaui konsep Jalan Tengah dan memanfaatkan undang-undang darurat perang. TNI terus membangun kekuatan sospol dan kegiatan lain demi memperkuat posisi mereka,

sehingga sebagai hasilnya di tahun 1965, tentara memiliki kedudukan yang kukuh dan telah menjadi bagian dalam struktur kekuasaan Demokrasi Terpimpin, (Crouch, 1999). Pada masa ini, lahirlah politisi dari kalangan perwira militer yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Para politisi dari kalangan TNI tidak seperti yang terjadi negara-negara lain yang memanfaatkan kekuatan militernya untuk mengambil alih kekuasaan di tangan sipil yang berkuasa. Mereka memainkan peran politiknya melalui jalan berunding dengan melakukan tawar menawar politik, dan membuat komitmen melalui kompromi-kompromi.

Kemenangan atas pemberontak dan melemahnya Demokrasi Parlemnter yang kemudian melahirkan undang-undang darurat perang sehingga secara bersamaan memberikan kesempatan untuk terlibat politik praktis kepada TNI. Situasi politik di dalam kancah perpolitik indonesia, kemudian menjadi cikal bakal Pidato Jalan Tengah oleh A. H. Nasution dan dipandang sebagai titik awal lahirnya doktrin Dwi Fungsi ABRI. Melalui pidato jalan tengah, ABRI tidak lagi hanya sebatas berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga berperan sebagai kekuatan sosial politik dalam sistem kebijakan struktur pemerintahan. Dari latar-belakang di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang harus di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan partai politik dengan militer pada masa Orde Baru.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah (*histories ressearch*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menganalisis sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Menurut (Nasution, 1971), bahwa penelitian dan penulisan sejarah harus melalui empat tahapan dan prosedur antara lain, mengumpulkan sumber/data (*heuristik*), melakukan verifikasi sumber data (*kritik*), mengkaji dan menganalisis sumber sejarah apakah saling keterkaitan atau tidak (*interpretasi*), menyimpulkan dan menyampaikan sintesa dalam bentuk kisah dan cerita sejarah (*historiografi*). Penelitian ini lebih fokus pada studi pustaka (*study library*) dengan melakukan pengumpulan data-data pustaka yang berkaitan dengan militer dan partai politik pada masa orde baru. Sumber pustaka diperoleh berupa, Arsip, Koran, Majalah, laporan penelitian dan artikel, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dengan melakukan studi pustaka ini, penulis

mencoba untuk dapat merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah secara lengkap dan akurat dengan menjelaskan secara kronologis agar mampu menggambarkan kisah sejarah yang objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dominasi militer dalam sistem politik nasional

Munculnya TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan dalam kancah perpolitikan nasional disambut baik disebagian kalangan sipil. Namun sebagian politik sipil beranggapan bahwa kehadiran militer dalam arena politik bertujuan untuk mencari popularitas serta mencari dukungan dalam masyarakat sipil. Sementara itu partai politik kehilangan pamor akibat kuatnya pengaruh militer yang mendominasi kehidupan dalam sosial-politik. Kekuatan pengaruh militer hingga mendapat kekuasaan dalam pemerintahan, maka TNI-AD mendapatkan angin segar dalam kehidupan politik kenegaraan kita dan menjadi satu-satunya kekuatan riil dari golongan militer. Sedangkan partai politik dan organisasi-organisasi massa lainnya berada dalam posisi tawar menawar yang lemah dan ambiguitas. Tetapi militer tidak melakukan partai politik secara egaliter dan tidak otoriter dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan, namun mereka tetap merakum secara akomodatif untuk berunding serta memberikan hak-hak untuk menyampaikan pendapat.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketika Orde Baru mewarnai sistem politik Indonesia yang di tompang oleh (Golkar) Golongan Karya sebagai manifestasi dari semua kekuatan fungsional yang masuk dalam sistem politik yang legal. Orde baru belajar dari pengalaman masa lalu, ketika partai politik pada masa Orde Lama sering terjadi pertentangan antar partai hanya disebabkan karena persoalan ideologi yang sama. Belajar dari itu, TNI melakukan penataan ulang struktur partai politik dengan meng-FUSI partai politik menjadi tiga yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Sebuah strategi politik yang dimainkan oleh golongan militer telah menyalurkan aspirasi politik masyarakat untuk mendukung Golkar sebagai basic masa yang kuat untuk merebut suara mayoritas. Bila dilihat dari basic masa, posisi militer memiliki doktrin kuat karna mempunyai sistem komando dalam menyerap suara arus bawah dan semakin kuat

kedudukannya dari kalangan bawah. Dalam sistem ini, pola hirarki pemerintahan Orde Baru dalam menjalankan roda pemerintahannya diperlukan strategi dan monoloyalitas yang tinggi dalam sistem komando, sehingga tercipta situasi dan stabilitas politik yang aman.

2. Militer di puncak kekuasaan

Pemberontakan PKI pada tahun 1965 telah mengubah peta politik nasional. Hancurnya PKI dan kaki tanganya ditandai dengan pertentangan antara Soekarno dengan pimpinan Angkatan Darat. Disatu pihak, Soekarno ingin memulihkan kekuasaan dan wibawanya dalam menjalankan pemerintahannya yang sah, di pihak lain adalah TNI yang merasa terancam kekuatannya akibat Soekarno yang masih begitu ngotot untuk menolak pembubaran PKI. Dengan kekuatan penuh dan strategi yang matang Jenderal Soeharto sebagai pimpinan tertinggi Panglima ABRI mampu membubarkan PKI dengan modal Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Dan dengan surat perintah itu dapat mengantarkan Soeharto di puncak kekuasaan berdasarkan sidang istimewa MPRS melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan menetapkan sebagai presiden RI sampai diadakan pemilihan umum (LIPI, 1999).

Dengan demikian keberhasilan menumpas Gerakan 30 September terdengar teriakan dan yel-yel masyarakat dalam memuji dan berterima kasih kepada tentara yang menyelamatkan negara dari paham ideologi komunis menggema di berbagai pelosok negeri. Untuk itu, mengantisipasi masih banyak pendukung Soekarno, tentara bersama Soeharto mempergunakan aktivis-aktivis mahasiswa dan pemuda untuk melakukan kampanye Anti-Soekarno. Semangat anti PKI mulai muncul dimana-mana, dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas dan tidak terkendali. Konsensus politik dari masa transisi kekuasaan yang dimana jabatan strategi yang dijabat oleh orang-orang PKI dengan cepat di ganti oleh militer. Dan pada awal Orde Baru semua instansi regional bahwa terdapat 12 dari 24 Gubernur adalah dijabat oleh TNI-Angkatan Darat termasuk di daerah strategi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan setelah dilakukan pemilihan umum tahun 1971 jumlah Gubernur yang dijabat oleh sipil turun menjadi 4 orang dari 26 Gubernur,

(Crouch, 1999). Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa militer sangat mendominasi perangkat pemerintahan baik di tingkat Gubernur maupun Kabupaten/walikota. Sementara itu, kontrol kebijakan mempunyai pengaruh kuat dalam membagi jasa terhadap kolega yang dianggap ikut mendukung kepentingan militer. Oleh karena itu, setiap keperluan izin, kontrak, dan proyek-proyek diberikan kepada mereka yang disetujui oleh militer, sementara mereka yang bertentangan dengan tentara di hukum dan juga dibatasi pergerakannya.

Kekuasaan dan kekuatan yang mendominasi di sektor birokrasi pemerintahan militer TNI-AD telah memperoleh kedudukan yang menguntungkan yang dapat menggeser kedudukan mereka yang tidak sependapat (baca pendapat). Dalam perjalanan Orde Baru, disemua sector nampak penuh dengan corak kemiliteran yang kemudian menimbulkan kritik dari masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa yang ikut andil atas lahirnya Orde Baru. Kritikan dan protes masa dari kalangan masyarakat dan mahasiswa akibat ketidak harmonisannya dalam tubuh pemerintahan sehingga kemudian posisi perintahan Orde Baru telah melahirkan konsesus politik nasional yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi generasi mahasiswa, (Dydo, 1986).

Protes dan masa aksi mulai nampak pada tahun 1970, karena pembangunan yang dibiayai melalui hasil tambang migas ternyata tidak terserap dalam kepentingan masyarakat kecil. Hasil tambang itu diperuntungkan bagi para penguasa yang kemudian dinikmati oleh anak cucu mereka. Kritikan itu diperparah akibat pengangkatan 3 jenderal yaitu Ali Martopo, Suriyo Sularso, dan Sujono Humardani menjadi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden telah melukai hati masyarakat sipil bahwa Orde Baru identik dengan junta militer. Kekhawatiran masyarakat akibat kekuasaan militer di tepuk pemerintahan menyebabkan militer tidak bisa menjadi penengah ketika terjadi kritikan dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintahan militer segera di akhiri dan dikembalikan kepada kekuasaan sipil.

3. Militer Dengan Partai Politik (1971-1998)

a) ABRI dan Golkar

Keberadaan Golongan Karya (Golkar) merupakan manifestasi dari dukungan militer atas masifnya kampanye PKI di

berbagai pelosok negeri. Dengan dukungan penuh dari militer, Golkar mendapatkan ruang politik yang bebas dari ancaman pengaruh Partai Komunis Indonesia. Sebagai reaksi itu, militer mulai menggalang kekuatan melalui golongan fungsional yang tidak terikat dengan satu partai, dan kemudian militer disatukan dalam suatu federasi yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sebenarnya lahirnya Sekber-Golkar bukan untuk menjadikan partai politik tetapi dibentuk untuk merespon kekuatan sayap kiri dari orang-orang PKI. Hanya setelah terjadi kudeta yang gagal oleh PKI, akhirnya Sekber-Golkar mulai berubah haluan menjadi partai politik, yang kemudian militer muncul menjadi kekuatan sopol yang juga berpengaruh di tubuh pemerintah, (Suryadinat, 1992).

Disisi lain adalah golongan fungsional yang tidak terafiliasi dengan partai politik bergabung menjadi Dewan Nasional seperti, Kaum Buruh, Tani, Pemuda, Pejuang, Pengusaha, Seniman, Wartawan, Wanita, Generasi 45, Ulama, Pendeta, Bisul, Keturunan Asing, Wakil Daerah, dan Kelompok ABRI, menjadi satu kekuatan yang terikat dalam Sekber-Golkar. Pembentukan itu, untuk meredam potensi konflik yang terjadi di berbagai daerah akibat pertentangan politik yang kemudian mengganggu instabilitas politik Nasional. Militer hadir sebagai kekuatan bersenjata bertekad untuk meyakinkan semua pihak, bahwa stabilitas keamanan adalah paling utama dalam bernegara sehingga hal demikian terciptalah sebuah wadah yang mewakili semua golongan. Setelah berhasil merang-kum semua golongan, militer memperkuat posisi mereka menjadi suatu badan yang bergerak di bidang kerja sama dan memperkuat hubungan antara suatu badan dengan badan lainnya.

Dengan demikian latar belakang lahirnya Sekber-Golkar didorong oleh kesadaran kolektif sebagai reaksi pembangkangan terhadap pancasila dan kuatnya pengaruh PKI dan elit-elitnya. Militer memainkan mesin politik yang demikian gencar dalam mencari mitra dukungan diberbagai kalangan untuk dapat melawan PKI. Untuk memperkuat hubungan militer dengan sipil, pada tanggal 5 september 1966, Soeharto sebagai militer pertahanan me-

ngeluarkan instruksi kepada Keempat Kepala Staf ABRI agar memungkinkan pengembangan pelaksana tugas Golkar baik di Pusat maupun Daerah untuk mendominasi posisi dominan. Soeharto yang pada masa awal Orde Baru masih berpegang teguh pada sumpah prajurit, dan kemudian telah menancapkan taringnya ke Golkar sebagai partai tunggal dalam arena politik indonesia. Setelah itu, Soeharto membersihkan orang-orang Soekarno yang menjabat di Sekber-Golkar seperti Brigjen Djuhartono, Imam Pratigny (Politisi NU), dan J.K. Tumakaka (tokoh eks PNI). Kemudian untuk memperkuat konsolidasi dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Sekber-Golkar tanggal 9-11 Desember 1965. Mukernas ini adalah untuk membentuk pengurus baru, dan hal-hal yang berbau Soekarno di dalam AD/ART Sekber-Golkar di hapus serta keberadaan orang-orang Soekarno akan menghambat langkah politik Sekber-Golkar.

Setelah itu dilakukan Mukernas II tanggal 2-7 November 1967 yaitu masih membahas seputar pembentukan pengurus baru, tetapi dalam Mukernas ini adalah militer mendominasi struktur pengurus DPP. Mukernas II menghasilkan beberapa keputusan antara lain, 1) Konsolidasi dilakukan berdasarkan pengelompokan organisasi anggota bersama induk organisasi, 2) pengelompokan organisasi berdasarkan sukarela, 3) Konsolidasi didasarkan pada keputusan DPP, 4) DPP diberi tugas untuk menyusun rancangan pedoman AD/ART dan di sesuaikan dengan kondisi, 5) nama dan bentuknya masih sekber. Namun masih ada sekitar 201 organisasi yang tidak ingin pengelompokan karena ketakutan akan hilang basis kekuatan, (Kapital Selekt Sospol ABRI, 1998).

Hubungan Golkar dengan militer menandai lahirnya kekuatan baru sebagai kekuatan dominan dalam pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh kekuatan penuh ABRI, Birokrat, Golkar (ABG). 1) ABRI sebagai kekuatan bersenjata untuk menekan sipil jika terjadi menghambat politik Golkar, 2) Birikrasi sebagai kunci untuk menekan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan loyal terhadap perintah untuk memilih Golkar, 3) Golkar, adalah alat untuk melegitimasi kekuasaan melalui unsur-unsur dimulai dari Komisi Pemilihan Umum, MPR,

DPR dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam negeri, (LIPI, 1999). Sebagai kekuatan atas nama ABG sebagai penyongkong pemerintah Orde Baru melakukan penataan ulang kepada semua unsur agar memenangkan Golkar melalui pemilihan umum. Awalnya ABRI dan Golkar hanya untuk melawan kekuatan politik Orde Lama Soekarno, agar paham komunisme indonesia tidak muncul lagi di indonesia, namun lambat laun berubah menjadi kekuatan politik otoriter dalam sistem politik indonesia masa Orde baru.

Hal demikian, semua itu merupakan format politik egaliter untuk menciptakan hubungan sinergi antara Golkar dengan ABRI dalam melawan dan menggusur lawan politiknya dan menjadikan Golkar sebagai kekuatan tunggal politik mayoritas. Konsolidasi politik melalui ABG adalah untuk memperkuat posisi Golkar pada setiap dilaksanan pemilu. Setelah berhasil memenangkan pemilu 1971, Golkar melakukan konsolidasi politik dengan mengubah pengelompokan organisasi federasi menjadi bentuk kesatuan dan langkah berikutnya adalah Sekber-Golkar menjadi Golkar (baca musyawarah). oleh karena itu untuk memusatkan organisasi, maka tanggal 2 mei 1973 semua organisasi yang tergabung dalam golongan fungsional maupun organisasi yang terhimpun dalam Kino mengintegrasikan di ke dalam Golkar, (Yulianto, 2002).

b) ABRI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bentuk lain dari koopotasi politik Orde Baru adalah klaim tunggal Golkar terhadap kehidupan perpolitik nasional pada masa itu, sehingga partai lain dapat ditentukan oleh berapa besar kemauan untuk patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan serta tidak melakukan kritik terhadap program-program pemerintah. Kehidupan sosial yang warnai dengan intrik politik yang menakutkan akibat intimidasi dan tekanan oleh rezim yang berkuasa dan kemudian partai lain tidak bisa melakukan check and balance terhadap negara demokrasi. Partai-partai yang kritis dan fokal dalam mengontrol kebijakan penguasa orde Baru di teror dan intervensi dalam urusan internal partai jika dilakukan musyawarah dan juga mukthamar serta pergantian pemimpin dalam kehidupan partai politik.

Namun disisi lain partai yang berhaluan kanan sesuai dengan cita-cita Orde Baru dapat menciptakan perpolitikan indonesia yang stabil tetapi tidak bebas dari tekanan dan intervensi, (Yulianto, 2002).

Hal ini terjadi yang di alami oleh Partai Persatuan Pembanguna (PPP) dibawah pimpinan Ismail Hasan Matereum menciptakan politik yang pro kebijakan pemerintahan Orde baru. Ketika partai hasil fusi itu melakukan Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 6-8 November 1975 Struktur kepengurusan partai masih di pimpin oleh H.M.S. Mintareja sebagai ketua umum pimpinan pusat, K. H. Ideam Chalid sebagai presiden partai, K. H. Masykur sebagai majelis pertimbangan pusat dan K.H.Basri Samsuri sebagai Rois Aam Majelis Syuroh. Pemerintah Orde Baru melakukan penggabungan (baca fusi) terhadap partai yang berhaluan islam melebur ke PPP karena telah menggagalkan RUU perkawainan yang di ajukan juga oleh pemerintah karena secara prinsip RUU itu bertentangan syariat islam. Ketegangan antara PPP dan Pemerintah diperparah ketika terjadi kasus Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Ali Martopo menuduh dalang peristiwa ini juga ada keterkaitan dengan PSI dan Masyumi tetapi di bantah oleh Syafrudin Prawiranegara, (LIPI, 1999). Oleh karena itu, untuk menghindari potensi konflik yang berkepanjangan di dalam internal partai, PPP membentuk dan menampung seluruh unsur berdasarkan hasil pemilu 1971.

Setelah itu pada pemilu 1977, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Amir Mahmud menolak lambang Ka'abah yang digunakan oleh PPP dan kemudian muncul juga penolakan di Lembaga Deperteman Agama tentang lambang ka'abah yang digunakan oleh PPP. Akan tetapi PPP tetap mempertahankan lambang itu sebagai identitas islam. Hal lain adalah terjadi pertentangan mengenai jatah kursi di DPR, NU merasa di rugikan karena jatah kursinya di komisi VII di pinjamkan kepada MI dan tidak mau di mengembalikan yang akhirnya dilakukan foting dan kalah. Pertentangan itu dapat diluhut ketikan warga PPP merasa asing antara satu sama lain sehingga jarak antara NU, Parmusi, PSII dan Perti belum dapat dihilangkan. Hal itu menghambat pola

hubungan antar umat dalam wadah PPP, (Yulianto, 2002).

Kasus ini mempertajam konflik di tubuh PPP, ketika beberapa orang dari unsur NU mengambil sikap untuk menandatangani petisi 50 dan pihak MI mengancam kepada rekannya yang ikut terlibat dalam petisi tersebut, (Haris, 1991). Petisi ini adalah konsolidasi dan mosi ketidak percayaan PPP kepada pemerintah yang melakukan intervensi terhadap internal partainya. Selain itu, ketegangan terjadi setelah pemilu 1977 dan pelaksanaan Sidang Umum (SU MPR) 1978, keretakan hubungan PPP dengan Pemerintah adalah pembahasan TAP MPR tentan P-4 (Pedoman Penghayaan Pengalaman Pancasila) yang kemudian aliran kepercayaan tuangkan dalam P-4 dan GBHN. Dalam kasus ini ada perbedaan pandangan terkait GBHN, di pihak PPP netral, Serikat Islam abstain, MI menekan untuk voting, sedangkan NU menolak keras voting dan memilih walk out dari ruang sidang. Hal ini membuat Soeharto menjaga jarak dengan PPP hanya karena sikap NU yang terlalu bersebrangan dengan keinginan pemerintah Orde Baru.

Sikap kritis NU terhadap pemerintah mengakibatkan tergesernya orang NU yang menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet pembangunan I. Dan dari sekian banyak menteri yang duduk di kabinet pembangunan I tinggal dua orang menteri yang bukan dari unsur golkar yaitu H.M.S. Mintaredja (Parmusi) dan Sunawar Sukowati (PNI), (Karim, 1993). Tergesernya PPP dari Menteri Agama yang selama ini di jabat oleh orang NU tampaknya pemerintah Orde Baru lebih memilih orang-orang loyalitasnya tinggi dengan pemerintah. Perseteruan demi perseteruan memuncak pada pemilu 1980 terkait dengan pengesahan UU pemilu. Perseteruan ini membuat orang PPP tidak solid dalam bersikap, NU menganggap tidak jurdil jika partai politik tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pemilihan umum. Sementara pihak lain yang tergabung dalam PPP seperti MI (Muhammadiyah), SI, dan Perti dapat menerima RUU pemilu.

Konflik panjang yang melibatkan orang NU di tubuh PPP memperpanjang keretakan hubungan antara PPP dengan pemerintah di perparah pada tahun 1982 dimana Idham Chalid di minta mundur oleh

para ulama yang melakukan pertemuan sepuluh ulama di Surabaya. Setelah itu pada tahun 1976 dilakukan Munas di Situbondo, NU kembali terpojok dan terpinggirkan yang kemudian pisah dari PPP. Dan setelah keluar dari PPP, NU berubah sikap tentang asas tunggal pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1978. NU menyatakan bahwa penetapan asas tunggal pancasila tidak bertentangan dengan syariat islam yang kemudian sikap NU ini mendapat respon dari pemerintah melalui Musyawarah Nasional di Situbondo 18-21 Desember 1994. Sementara itu, muncul perdebatan antara PPP dengan kubu Naro mengenai tanda gambar ka'abah yang dimasukan kedalam asas tunggal pancasila. Kubu Naro menganggap lambang ka'bah adalah hasil dari musyawarah melalui muktamar sebagai ideologi islam untuk memperoleh suara di umat islam.

Akhirnya konflik internal di dalam tubuh PPP membentuk kubu dalam menyusun strategi. Di kubu Soedjadi menginginkan lambang ka'abah di ganti dengan menyusun strategi politik dan membentuk tim 18 yang berjumlah 18 orang dengan ketua umum Syah Manaf dan Syarifudin Harahap sebagai sekjen. Dalam pembentukan kelompok ini mengubah susunan struktur kepemimpinan secara sepihak. Kubu Soedjadi mengajukan daftar kepengurusan baru hasil dari keputusan kelompok 18 di tolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konflik kepentingan belum usai di tubuh PPP, di pihak NU membuat fatwa bahwa umat islam tidak seharusnya memilih atau mencoblos ka'abah (PPP), namun juga umat islam bisa memilih Golkar dan PDI sebagai aspirasi politiknya. Di lain pihak adalah kelompok Naro mengajukan DCS ke PPP dan menggeser kubu Soedjadi dari daftar kepengurusan. Sebagai keberlanjutan aspirasi politiknya PPP mengumumkan calon presidennya melalui sidang umum MPR 1988 dengan mengusulkan Naro sebagai calon wakil presiden dan bersaing dengan Sudharmono dari Golkar.

Mendengar apa yang disampaikan oleh PPP bahwa Naro akan di calonkan sebagai wakil presiden, tekanan dan intervensi nampak terlihat jelas, di tambah lagi dengan pernyataan Soeharto melalui

sidang Muktamar II PPP yang akhirnya Naro mengundurkan diri dari calon wakil presiden. Dalam pernyataan Soeharto menyatakan bahwa "Kalau seandainya majelis sidang bertanya kepada siapa yang saya pilih di antara kedua calon tersebut, lalu saya menjawab secara rasional, saya lebih mengenal Sudharmono dan lebih dekat dengan Sudharmono dari pada Naro. Dengan begitu, hubungan saya dengan Dharmono lebih akrab dan saya lebih percaya kepada Dharmono dari pada Naro, (Haris, 1991). Riwayat Naro dalam tubuh PPP akan berakhir setelah pemerintah menyatakan tidak akan menyukai formatur tunggal dalam kepemimpinan PPP. Berdasarkan intervensi pemerintah bersama militer secara langsung, tetapi tersembunyi, PPP berhasil di pilih 7 orang formatur melalui Mukthamar II. Ketujuh orang ini seperti Ismail Hasan Matereum, Naro, Kadir Abbas, Karimin, Imam Syofian, Sulaiman Fadely, dan Mukshin Bawadha akan memimpin DPP PPP kedepan. Dan menjelang pelaksanaan pemilu 1992, terjadi tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh ABRI di setiap daerah seperti Lampung, Aceh, dan Jambi mendapatkan tindakan kekerasan serta melarang simpatisan untuk menghadiri kampanye PPP.

Dari semua kasus di atas menunjukan bahwa permainan politik sipil sangat ditentukan oleh legitimasi kekuasaan Negara. Kehidupan politik yang diwarnai dengan kecemasan, bahwa dominasi kekuasaan untuk dapat menentukan aspirasi politik termasuk orang yang ingin menjabat dalam organisasi sipil seperti partai politik sangat ditentukan oleh penguasa. Kasus PPP ini menjadi suram dalam sistem politik nasional, ketika di tubuh PPP dilanda konflik internal akibat ikut campur pemerintah dalam kebijakan internal partainya. Dengan demikian demokrasi yang diterapkan hanya demokrasi Semu, karena seseorang pemimpin parpol tidak leluasa memiliki kekuasaannya, meskipun ia terpilih melalui mekanisme pemilihan menurut AD dan ART.

c) Militer dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai hasil fusi ini yang tergabung dalam beberapa partai seperti PNI, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo tahun 1973 mengalami pasang surut dan gejolak dalam

internal partai. Sedangkan Peta politik dalam tubuh PDI setelah pemilu 1971, masih dibawah kekuasaan Hadisubeno. Dan ketikan pada pembentuk DPD DKI Jakarta, terjadi pertentangan antara eks-PNI, IPKI, dan Murba dengan eks-partai Katolik dan Parkindo akibat tidak dilibatkan kedua partai katolik dan parkindo dalam pembentukan DPD tersebut. Konflik internal dalam partai di akui oleh Sunawar Sukowati (eks-PNI) selaku ketua DPP hasil Kongres XII di Semarang, bahkan dalam pembentukan BP MPR 1973, eks-PNI ini tidak melibatkan IPKI dan Murba, (Karim, 1993).

Dampak akibat dari penggabungan partai politik (baca fusi) menimbulkan konflik kepentingan di tubuh PDI disebabkan hanya persoalan perbedaan ideologi, visi misi, dan basic masa. Konflik internal PDI terjadi lagi pada tahun 1975 akibat perbedaan pendapat di kalangan PNI tentang pelaksanaan Kongres I, dipihak Isnaini Sunawar tidak menginginkan kongres karena terlalu cepat, sedangkan di kubu lain ingin mempercepat kongres sebagaimana yang disepakati dalam Musyawarah Nasional PNI tahun 1974, sehingga pihak Isnaini dan Abdul Majid tersingkir dari jabatannya. Tersingkirnya Isnaini dkk di tubuh PDI adalah keterlibatan pihak lain (eksternal) dalam men-capuri urusan internal partai yaitu kuatnya intervensi Soeharto agar Isnaini dapat disingkirkan dari kepemimpinan PDI.

Keterlibatan pemerintah bersama militer di dalam PDI karena tidak ada mekanisme penyelesaian konflik di internal partai PDI. Keretakan hubungan yang di wariskan oleh dua kubu garis keras dengan kubu moderat di peralat oleh ABRI yang lebih dekat dengan kelompok moderat untuk dapat meredam konflik, sehingga kelompok moderat dapat perlindungan dari pemerintah. Kemudian gesekan politik berlanjut pada Kongres I tahun 1976, dimana kedua kubu saling bertikai dalam pelaksanaan Kongres I PDI. Kongres ini terjadi dualisme kepemimpinan, di kubu Isnaini membentuk DPP tandingan karena tidak terpilih, sedangkan di pihak lain adalah kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan Sanusi sebagai ketua umum, Ahmad Sukarmadijajah (IPKI), Muhidin Nasution (Murba) yang masing-

masing ketua DPP dengan kebijakannya mengenai DPD DKI Jakarta yang tidak menguntungkan semua unsur. Gesekan politik di kalangan PDI terjadi lagi karena persoalan hak interpelasi melalui Fraksi-PDI di DPR bahwa kelompok Ahmad Sukarmadijaja mencalonkan Isnaini sebagai ketu DPR/MPR, sedangkan kelompok Sanusi mencalonkan Usep. Dalam konflik ini, ikut campur penguasa dan ABRI kembali terjadi, sehingga penguasa lebih memilih Isnaini karena Usep anti terhadap Dwifungsi ABRI.

Konflik yang berkepanjangan di internal PDI sifatnya menjadi politis dan tidak bersifat organisatoris berdasarkan ketentuan konstitusi yang ada. Konflik demi konflik terus mawarnai di tubu PDI akibat kepentingan politik yang tidak bisa menguntungkan semua kelompok yang akhirnya melibatkan unsur lain (baca ABRI). Akibat dari keberlanjutan konflik yang terus menerus terjadi di tubuh PDI sebagaimana yang di tulis oleh Harian Kompas bahwa "PDI yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh masyarakat umum. Mereka ricuh, kemelut, tidak taat, dan ada yang bilang bahwa semua itu adalah ciri khas PDI sebagai partai politik yang demokratis. Karena demokratisnya, siapa saja dalam partai kalau dirinya menurut interpretasinya sendiri berhak memecat siapa yang tidak di senangi, maka di pecatlah orang yang tidak disukai itu. Juga siapa saja dalam partai itu kalau taksiranya sendiri ia barhak menjadi ketua. Satu contoh penerapan atas demokrasi yang paling *chaos dan anark* (yulianto, 2002: 300).

Tulisan kompas ini menunjukan bahwa kemelut yang terjadi di tubuh PDI dirundung konflik yang tak kunjung selesai yang kemudian ketua umum PDI Sanusi Hardjadinata mengundurkan diri tanggal 16 Oktober 1980. Setelah itu muncul kelompok-kelompok di PDI pada Kongres ke II antara lain Usep, Abdul Majid, Ny. D. Walandow, dan Jakariah Raib melawan kelompok Isnaini-Sunawar. Kelompok Isnaini juga mempertanyakan keabsahan kongres kepada kelompok Usep dkk tentang keputusan tidk ditentukan melalui konfrensi cabang. Hal itu melanggar UUD No.5/1975 dan AD/ART sesuai ketetapan kongres I yang melibatkan semua unsur

dalam mengambil keputusan. Untuk mengantisipasi perlawanan dari kubu Isnaini, maka kelompok Usep dkk (kelompok empat) melakukan koalisi juga dengan Sunawar-Sukowati yang difasilitasi oleh Pangkoptantib Sudomo (ABRI). Pada pertemuan ini, diperoleh suatu keputusan untuk mencalonkan Sunawar-Sukowati sebagai ketua umum dan juga komposisi pemimpin di PDI adalah ketua umum (PNI), sekjen (Parkindo), dan bendahara (Partai Katolik).

Setelah berhasil menetapkan Sunawar-Sukowati sebagai ketua umum PDI, konflik kembali muncul antara Sunawar dengan kelompok empat, dengan membuat SK kepemimpinan untuk dapat menetapkan Sukowati. Hal ini disebabkan karena Sunawar menanggapi pidato kenegaraan Soeharto di DPR tentang negara sekuler. Dengan demikian posisi Sunawar digeser melalui Kongres III dan di bantu oleh kekuatan ABRI dan di sepakati hasil pertemuan antara lain mantap ideology, mantap politik, mantap organisasi, dan mantap personl, (LIPI, 1999). Pada kongres III PDI 1986 berhasil mengantarkan kaum mudah ke puncak kekuasaan dengan mekanisme penyelesaian konflik terjadi diserahkan kepada pemerintah. Pada era baru ini, kader-kader mudah PDI menginginkan agar kaum tua tidak lagi menjadi pengurus aktif karena memicu timbulnya potensi konflik. Era ini di pimpin oleh Soerjadi dan Niko Daryanto sebagai manifesto anak mudah yang kemudian berkonflik dengan Megawati, karena Soerjadi diketahui seorang dari pemerintah yang disusupkan ke PDI. Belakangan isu ini di ketahui ketika pada pertemuan pada 2 Mei 1986 di antara panglima ABRI L. B. Moerdani, Mensesneg Sudarmono juga menyarankan kepada Mendagri Soepardjo Roetam untuk memilih Soerjadi sebagai ketua umum PDI dan Nico Daryanto sebagai sekjen.

Pada pemilu 1987, konflik muncul lagi akibat keberadaan SK DPP No. 59 yang mengatur tentang masa kerja anggota F-PDI di DPR hanya dua periode. Pada pemilu ini, terpilihnya orang-orang yang di daerah DPP masing-masing, dan di Kubu Kemas Fachrudin menolak untuk mengundurkan diri karena menang di daerahnya. Sementara itu, di kubu DPP meminta kepada

Kemas untuk mematuhi SK DPP. Peristiwa ini adalah sebagai pembangkangan kelompok tua dengan membentuk kelompok 17 untuk menghapus kurikulum Pendidikan Agama di sekolah-sekolah. Kelompok penentang ini semua dari unsur PNI seperti H. Teuku Talib Ali, H. Marsoesi, Dudy Singadilaga, Kemas Fachrudin, Yusuf Merukh, Achmad Subagio, Suparman Adi Widjaj, Abdul Jafar, dan I. G. N. Yudha. Konflik ini semakin memperuncing ketika DPP pertemuan di Cisarua, Jawa Barat. Hasil pertemuan itu adalah untuk membekukan DPD PDI di Jawa Barat dan memecat orang yang di anggap melakukan kudeta seperti H. Teungku Talib Ali dkk, (LIPI, 1999).

Pemecatan itu memperpanjang potensi konflik di partai PDI dimana mereka yang dipecat membentuk DPP tandingan yang diketuai oleh Dudy Sinadilaga yang kemudian mengumumkan susunan pimpinan DPD PDI bentukan kelompok 17 dan sebagai ketua umum Dudy sendiri dan sekjen adalah Yusuf Merukh. Dalam Kongres IV PDI di Medan kelompok 17 kemudian bergabung dengan kubu Soerjadi yang tidak di khendaki oleh pemerintah dan ABRI. Soerjadi membuat pemerintah khawatir atas manufer politiknya yang semakin kuat dan mengganggu kelanggehan kekuasaan Orde Baru setelah pemilu 1997.

Sikap Soerjadi dalam menanggapi persoalan kecurangan pemilu membuat geram pemerintah dan ABRI. Sejumlah kasus yang menjeratnya mulai diungkit untuk menggusurnya apalagi Soerjadi di jadikan sebagai saksi dalam tindakan kriminal atas penculikan aktifis PDI yang menentang pemerintahan Orde Baru. Hal ini sebagai upaya untuk mengusir Soerjadi dari kepemimpinan PDI. Pembangkangan Soerjadi terlihat di kongres Medan ketika Presiden Soeharto resmi membuka kongres ribuan masa pendukung Soerjadi menerobos masuk dan menduduki tempat berlangsungnya kongres. Dalam kongres ini, Soerjadi kembali terpilih sebagai ketua umum PDI, lalu kemudian di kelompok Jacob mengambil alih pimpinan sidang dan mengeluarkan pernyataan bahwa terpilihnya Soerjadi tidak sesuai dengan aturan alias cacat hukum. Untuk itu, kelompok Jacob meminta bantuan pemerintah untuk

menyelesaikan persoalan di tubuh PDI, (Yulianto, 2002).

Hasil kongres Medan di manfaatkan oleh pemerintah, bahwa kemenagan Soerjadi adalah pembajakan konstitusi dan sudah barang tentu hal ini merupakan tiket gratis bagi pemerintah untuk tidak mengakui kepemimpinan Soerjadi di PDI. Melalui Mendagri Yogie S, Memet, pemerintah menyatakan kongres IV PDI di Medan adalah gagal. Menanggapi hal ini, kelompok PDI dibawah pimpinan Aberson, Marsoesi, dan Ismunandar lagi-lagi meminta perlindungan dari pemerintah untuk membentuk caretaker dalam persiapan Kongres Luar Biasa, (KLB). Setelah berhasil membentuk KLB di Surabaya dan dipilinya Latief Pujosakti sebagai ketua sesuai yang diharapkan pemerintah.

Konsesus politik kembali terjadi, ketika 700 orang dari pendukung PDI mendatangi rumah Megawati yang pada waktu itu sedang berulang tahun di rumahnya. Mereka meminta kepada Megawati untuk bersedia mencalonkan dirinya menjadi ketua umum PDI. Dan pada saat yang sama Megawati mengeluarkan pernyataan dalam bukunya bahwa "Bendera Telah Kukibarkan", hal itu sebagai bukti bahwa beliau serius mencalonkan dirinya sebagai ketua umum PDI. Melihat kondisi di atas, pemerintah menekan kepada DPC PDI di daerah melalui Kodim hingga Kodam agar Megawati tidak dicalonkan dan bersedia datang ke Surabaya. Upaya pemerintah Orde Baru menjegal Megawati dengan melibatkan unsur-unsur ABRI disebabkan karena 1) Megawati merupakan ahli waris dan putri Soekarno sehingga menimbulkan ketakutan akan munculnya Sukarno, 2) bila Megawati lolos ke KLB, maka Megawati dianggap mengancamkan status quo kekuasaan. (LIPI,1999:157).

Setelah melakukan manufer politik melalui KLB dibawah tekanan, intimidasi, dan intervensi yang masif dilakukan oleh pemerintah bersama ABRI, Megawati dapat dipilih berdasarkan suara DPC dengan 256 suara. Dalam hal ini upaya penjagalan Megawati adalah sia-sia, karena Megawati didukung oleh kekuatan arus bawah. Kemenagan Megawati di tanggapi serius oleh pemerintah dengan memanggil Mendagri ke istanah negara, namun kemenangan ini belum menyatakan pengakuan

oleh Kemendagri. Akibat tekanan dan intervensi yang kuat oleh kaki tangan ABRI sehingga pemerintah menetapkan Soerjadi sebagai formatur terpilih PDI dan menolak dan membatalkan kemenangan Megawati. Hal ini juga di tantang oleh pendukung Megawati hingga terjadi insiden Gambir 1996 akibat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap aktifis pro-demokrasi.

Akibat dari diskursus politik yang demikian masif baik dilakukan dalam internal partai PDI maupun keterlibatan Militer dalam urusan internal partai PDI adalah mencegah kader-kader radikal di tubuh PDI. Sehingga kemudian arah politik PDI di tentukan oleh penguasa yang di anggap mengganggu stabilitas politik golkar dan Soeharto. Hubungan militer dengan PDI dapat diredam apabila mereka mau kompromi dan juga mau di atur oleh penguasa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kehidupan politik Orde Baru yang ditandai dengan sistem monopoli kekuasaan dapat kita lihat bagaimana dominasi kekuatan politik selama tiga dekade berlangsung tidak terlepas dari mesin politik yang digerakan melalui (ABG) ABRI, Birokrat dan Golkar. Praktek monopoli kekuasaan yang mereka klaim sebagai demokrasi Pancasila cenderung bersifat otokrasi terhadap lawan politiknya yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Secara jelas rezim Orde Baru mempraktekkan sistem nepotisme dan melakukan pembatasan terhadap orang-orang di luar lingkaran barisan pendukung di mana hal ini mirip dengan gaya kepemimpinan otokrasi. Praktek monopoli kekuasaan yang dutunjukkan oleh rezim Orde Baru juga sampai ke dalam hal ideologi. Pancasila diterapkan sebagai ideologi tunggal bagi organisasi politik maupun organisasi masyarakat yang berproses pada pemerintahan. Selama kekuasaan rezim Soeharto menunjukan sikap represif dengan melakukan tindakan kekerasan dan pembungkaman terhadap orang-orang yang di anggap oposisi melawan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu Orde Baru sering melakukan intervensi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik yang terlibat dalam konflik internal.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Taufik dan Abdulrahman Surjomiharjo, 1985. *Sejarah Dan Historiografi*. Jakarta, Gramedia
- Crouch, Harold. 1999. *Militer Dan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta, pustaka sinar harapan.
- Dydo, Todiruan, 1989. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum Dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta, Golden Terayon press.
- Gootschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta, UI Press.
- Karim Ruslin. 1993. *Perjalanan Partai Politik Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Karim Ruslin. 1993. *Kapital Selektif Sosial Politik ABRI, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Jakarta.
- LIPI, 2001. *Militer Dan Politik Kekerasan Orde Baru, Soeharto Dibelakang Peristiwa 27 Juli*, Bandung Media Uatam.
- Nasution, A.H. 1985. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5, Masa Konsolidasi Orde Lama* Jakarta, Yayasan Masagung.
- Notosusanto, Nugroho, 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian Dan Penulisan Sejarah*. Jakarta, pusat Sejarah ABRI.
- Perlmutter, Amos. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rauf, Maswadin. 2001. *Konsensus Dan Konflik Politik Sebuah Perjalanan Teoritis*. Jakarta.
- Sundhausen, Ulf, 1987. *Politik Militer Indonesia 1945 - 1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta, LP3 ES.
- Suryohadiprojo, Suyidiman, 1996. *Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangannya*. Jakarta, Intermesa.
- Yulianto, Arif, 2002. *Hubungan sipil Militer Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta, Raja Grafindo Persa.